



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI *INTEGRATED REPORTING*

Akbar Kurnianto^{1*}, Unggul Purwohedhi², Rida Prihatni³

¹²³ Universitas Negeri Jakarta

Abstract

Financial information which has been the main analytical as well as the main accountability tool to investors apparently unable to meet the demands of investors, especially in terms of non-financial information disclosure. Integrated reporting (IR) exist to respond this issue. This study analyzes the effect of the size of the public accounting firm (KAP), stakeholder pressure, audit committee meetings, and audit committee authority on IR. Property, real estate and construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) were selected as the object of this study because they were considered to have complex information in their operations. Through a purposive sampling technique, 116 samples were selected during the 2016-2017 observation year that were processed with multiple linear regression analysis on the Eviews 8 analysis tool. Based on the results and conclusions of the study, audit committee meetings and the audit committee authority have a positive and significant influence on (IR). This shows the company will maximize IR practices if the audit committee has a high frequency of meetings and expanded authority of the audit committee. Meanwhile, KAP size and stakeholder pressure have not been proven to have an influence on IR.

Keywords: *Integrated Reporting, Public Accounting Firm Size, Stakeholder Pressure, Audit Committee Meeting, Audit Committee Authority.*

Abstrak

Informasi keuangan yang selama ini menjadi alat analisis sekaligus pertanggungjawaban utama kepada investor dirasa tidak mampu memenuhi tuntutan investor, terutama akan informasi non-finansial. *Integrated reporting* (IR) hadir sebagai suatu laporan terintegrasi yang menggabungkan informasi finansial dan non-finansial ke dalam suatu laporan yang mampu menyajikan informasi secara komprehensif bagi penggunaannya. Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik (KAP), tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap IR. Perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai objek penelitian ini karena dinilai memiliki informasi yang kompleks dalam operasinya. Melalui teknik *purposive sampling*, terpilih 116 sampel selama tahun amatan 2016-2017 yang diolah dengan analisis regresi linier berganda pada alat analisis Eviews 8. Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, rapat komite audit dan otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap (IR). Hal ini menunjukkan perusahaan akan memaksimalkan praktik IR apabila komite audit memiliki frekuensi rapat yang tinggi serta diperluasnya otoritas dari komite audit. Sementara, ukuran KAP dan tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR.

Kata Kunci: *Integrated Reporting, Ukuran KAP, Tekanan Pemangku Kepentingan, Rapat Komite Audit, Otoritas Komite Audit.*

How to Cite:

Kurnianto, A., Purwohedhi, U., & Prihatni, R. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi *Integrated Reporting*. Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing, Vol. 1, No. 1, 16-30. <https://doi.org/xx.xxxx/JAPA/xxxxx>

* Corresponding Author:

Akbar Kurnianto (akbar.ishu@gmail.com)

PENDAHULUAN

Bangsa-bangsa di dunia, melalui *United Nations* (Persatuan Bangsa-bangsa “PBB”), telah menentukan arah pembangunan kehidupan umat manusia di muka bumi untuk tahun sejak 2016 hingga 2030. Suatu manifesto yang dinamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dirancang untuk menciptakan tatanan hidup secara berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* memetakan tantangan global yang kita hadapi, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, serta perdamaian dan keadilan (United Nations).

Menjawab harapan besar yang digagas oleh bangsa-bangsa di dunia, pemerintah telah mengeluarkan suatu instrumen kebijakan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Perpres tersebut, diungkapkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan praktik terintegrasi dari berbagai segmen, termasuk segmen bisnis.

Selaras dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam negeri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, segmen bisnis infrastruktur dan konstruksi adalah segmen yang cukup vital dalam mendorong upaya tersebut. Pada praktiknya, industri konstruksi juga memiliki informasi kompleks yang harus dilaporkan guna menghasilkan suatu instrumen informasi yang dapat dipergunakan dalam upaya pengambilan keputusan. Pada kriteria kompleksitas informasi tersebut, segmen konstruksi memiliki alasan yang cukup untuk menerapkan *integrated reporting*.

Integrated Reporting – biasa disimbolkan IR – merupakan model pelaporan perusahaan yang dikembangkan oleh International Integrated Reporting Council (IIRC) dan didukung oleh Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2011. *Integrated Reporting* dapat digambarkan sebagai pelaporan 'holistik' di mana para pemangku kepentingan akan dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi perusahaan (Abeysekera, 2013).

Penelitian Ghani *et.al* (2018), menyebutkan bahwa ukuran KAP memengaruhi secara positif terhadap penerapan IR, yang artinya manajemen akan menggunakan IR sebagai pelaporan mereka apabila auditor eksternal adalah mereka dengan ukuran firma yang besar. Hal tersebut didukung dengan argumen bahwa perusahaan yang menunjuk KAP dengan ukuran yang besar, adalah mereka yang memiliki tuntutan pelaporan yang tidak sederhana, sehingga mereka membutuhkan auditor yang kompeten untuk menanganinya.

Beralih kepada faktor lainnya, Kurniawan dan Wahyuni (2018) menemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan dapat memengaruhi penerapan IR secara negatif, yang artinya, ketika perusahaan mendapatkan tekanan yang cukup besar dari pemangku kepentingan, perusahaan akan cenderung menahan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial pada IR mereka. Hal ini secara sederhana dapat dipahami bahwa perusahaan dalam kapasitasnya sebagai pembuat laporan perusahaan, merasa tertekan sehingga mereka tidak memiliki ruang yang cukup dalam upaya melakukan pelaporan informasi perusahaan.

Dari perspektif internal, Haji (2016) menemukan hubungan positif signifikan antara fungsi komite audit beserta aspek spesifiknya, yaitu rapat komite audit dan otoritas komite audit terhadap IR. Pengaruh rapat komite audit terhadap IR juga didukung oleh penelitian Chariri dan Januarti (2017). Untuk rapat komite audit, intensitas rapat komite audit ternyata dapat meningkatkan pengungkapan *item* pada *integrated reporting*. Hal tersebut dapat terjadi karena komite audit yang memiliki intensitas rapat yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar dalam melakukan fungsi pengawasan mereka, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada pokok mereka dalam melakukan pengawasan audit tahunan, tetapi juga dapat menyentuh substansi pelaporan perusahaan secara lebih luas. Sementara untuk fungsi komite audit, perusahaan yang memiliki fungsi komite audit yang cukup komprehensif akan cenderung melakukan pengungkapan *item* yang lebih baik pada IR mereka dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh komite audit meluas dan dapat menyentuh substansi dari IR. Serta pada otoritas komite audit, perusahaan dengan fungsi mandatoris komite audit yang jelas terbukti memiliki kualitas pengungkapan IR yang lebih baik, hal tersebut diakibatkan bahwa koridor

pelaksanaan wewenang dari komite audit telah difokuskan sejak awal untuk mendukung terlaksananya IR.

Dalam laporan gabungannya, KPMG, GRI, United Nations Environment Programme (UNEP) dan *Unit for Corporate Governance in Africa* dari University of Stellenbosch Business School (2010:8), menjabarkan beberapa alasan terhadap pengimplementasian pengungkapan laporan berbasis *voluntary* dan *mandatory*. Pelaporan berbasis *mandatory* akan baik digunakan karena hal itu akan membantu dalam hal komparabilitas, penghematan dana, dan standarisasi. Sementara pelaporan berbasis *voluntary* juga akan tepat digunakan karena hal itu didasarkan poin fleksibilitas, proksimal, dan aspek kepatuhan. Berkenaan dengan penerapan IR, IR telah diterapkan secara *voluntary* dan *mandatory*. Meskipun demikian, basis *voluntary* dan *mandatory disclosure* dari IR, masih terdapat perdebatan yang begitu menarik dari penerapan keduanya.

Berdasarkan poin-poin di atas, peneliti memandang penelitian terhadap IR relevan dilakukan, terlebih lagi di Indonesia yang masih menerapkan basis *voluntary*. Sesuai dengan isu penerapan IR di berbagai Negara terutama negara Indonesia yang masih minim. Penelitian ini akan dimaksudkan untuk melihat pengaruh langsung dari variabel ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit terhadap *integrated reporting*.

TINJAUAN TEORI

Stakeholder Theory

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984), yang menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah mereka yang terpengaruhi oleh pilihan dan tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan mereka yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi pilihan tersebut. Teori pemangku kepentingan menggunakan perspektif yang melihat ke depan dan berusaha memahami bagaimana manajer dapat menangani klaim pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (Olsen, 2016)

Integrated Reporting

Jensen dan Berg (2012) mengungkapkan, bahwa terdapat peningkatan permintaan untuk menyatukan informasi finansial dan informasi non-finansial ke dalam satu laporan. *Integrated Reporting* atau biasa disingkat IR adalah laporan terintegrasi yang berisi komunikasi singkat tentang bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternalnya, mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang (IIRC, 2013). IR saat ini telah digunakan oleh perusahaan baik di sektor publik maupun swasta (Macnab, 2015). Berdasarkan IR *framework*, tujuan utama dari IR adalah menjelaskan kepada penyedia modal, bagaimana organisasi menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, IR menyediakan informasi relevan baik berupa informasi finansial, maupun informasi non-finansial. IR secara positif berpengaruh terhadap konten dan keseimbangan pada pengungkapan berkelanjutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa IR adalah teknologi akuntansi yang berguna (Broadbent, 2016).

Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh IR adalah penekanan terhadap materialitas (Montecalvo *et.al*, 2018). IIRC menyempurnakan IR dengan menghadirkan suatu *framework*. IIRC menyempurnakan IR dengan menghadirkan suatu *framework*. *Framework* ini mengandung tujuh prinsip panduan dan sembilan elemen konten.

Ukuran KAP

Ukuran KAP dapat didefinisikan sebagai besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat digolongkan menjadi dua, yaitu KAP berukuran besar (*the big four*) dan KAP berukuran kecil (*non the big four*) (Saemargani dan Mustikawati, 2015). KAP yang tergolong dalam *the big four* terdiri dari KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse Copers, dan Deloitte Touche Tohmatsu. KAP berukuran besar biasanya peduli dengan reputasi mereka karena mereka lebih bersedia bekerja

dengan perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan mereka dan pastinya mereka memiliki pengalaman dalam menghadapi perusahaan dari berbagai wilayah dan kultur (Ghani *et.al*, 2018).

Tekanan Pemangku Kepentingan

Tekanan Pemangku Kepentingan adalah “tekanan” dari *stakeholder* perusahaan terhadap manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi finansial dan non-finansial (Kurniawan dan Wahyuni, 2018). Tekanan pemangku kepentingan ini dapat muncul dari berbagai kelompok terhadap perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan kelompok dengan kepentingan tertentu (Lu dan Abeysekere, 2013). Selain itu, menurut Helmig, Spraul, dan Ingenhoff (2016), tekanan pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan kapasitas pemangku kepentingan untuk memengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Tekanan pemangku kepentingan dianggap sebagai satu set tekanan yang stabil (Murillo-Luna, *et. al.* dalam Betts, Wiengarten, dan Tadisina, 2015). Tekanan dari pemangku kepentingan ini akan memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dalam berbagai konteks, sesuai dengan di mana posisi pemangku kepentingan tersebut.

Tekanan pemangku kepentingan ini dapat muncul dari berbagai kelompok terhadap perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan kelompok dengan kepentingan tertentu (Lu dan Abeysekera, 2013). Dalam penelitiannya, Hamudiana dan Achmad (2017) menggunakan model pendekatan yang dikembangkan oleh Fernandez-Feijoo (2013), yaitu pendekatan yang menjabarkan tekanan pemangku kepentingan ke dalam empat macam kategori industri berdasarkan empat kelompok pemangku kepentingan utama, yaitu lingkungan, konsumen, investor, dan pekerja.

Rapat Komite Audit

Komite audit yang berwenang sebagai pengatur tata kelola dan struktur perusahaan merupakan suatu komite khusus yang dibentuk oleh *principal* dengan tanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen perusahaan telah memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang sebenarnya (Marsha dan Ghozali, 2017). Dalam menjalankan tugasnya, komite audit perlu merumuskan dan mengevaluasi serangkaian tindakan yang perlu dilakukan selama mengawasi berjalannya kegiatan perusahaan. Dalam proses pelaksanaan hal-hal tersebut, komite audit perlu bertatap muka dan melakukan pertemuan (rapat). Banyaknya rapat komite audit menandakan bahwa mereka memiliki keinginan untuk memenuhi kewajibannya sebagai komite audit (Abbott *et. al.*, 2000). Sementara, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 tahun 2015, rapat komite audit diadakan secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan, atau dapat dipahami, empat kali dalam setahun.

Otoritas Komite Audit

Otoritas komite audit merupakan mandat komite audit yang diartikulasikan secara jelas dalam tugas organisasi tertentu (Bedard *et. al*, 2004). Secara konvensional, tugas komite audit telah ditetapkan berupa tanggung jawab terhadap proses pelaporan keuangan, masalah *internal control*, dan juga telah dilibatkan dalam penunjukan auditor independent. Seiring dengan perkembangan dasar operasi perusahaan dan fokus pemangku kepentingan, peran dari komite audit mulai meluas, seperti halnya isu tentang manajemen risiko perusahaan dan pelaporan non-finansial juga menjadi lingkup tugas komite audit (Haji dan Anifowose, 2016).

Seiring dengan perkembangan tugas komite audit yang kian meluas, perusahaan mulai mempertimbangkan untuk mengungkapkan otoritas komite audit yaitu tidak hanya mengurus masalah pelaporan finansial dan *internal control*. Dengan adanya tren yang demikian, ditambah lagi kecenderungan berbagai macam perusahaan dalam mengungkapkan informasi non-finansial, otoritas komite audit kini mulai dipertimbangkan sebagai suatu komponen pelaporan.

Pengembangan Hipotesis

Ukuran KAP Terhadap *Integrated Reporting*

Auditor independen yang digunakan oleh perusahaan, dilihat dari ukurannya, dapat menjadi salah satu acuan seberapa perusahaan tersebut membutuhkan tenaga profesional yang mampu menghadapi kompleksitas permasalahan perusahaan dalam hal pelaporan keuangan – maupun non-keuangan. Semakin besar perusahaan dan tentunya semakin besar kompleksitas operasi perusahaan, pastinya perusahaan membutuhkan tenaga auditor independen yang sangat profesional. Hal tersebut juga bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan dengan tingkat kebutuhan yang demikian, pastinya akan membutuhkan jasa KAP dengan ukuran yang besar. Perusahaan yang memiliki tuntutan pelaporan menggunakan IR, akan membutuhkan KAP yang kompeten dan kapabel dalam mendukung upaya tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas informasi yang dimiliki perusahaan berada pada tingkat yang berbeda dari perusahaan lainnya. Pertimbangan KAP seperti *big four* mungkin akan jadi poin penting dalam mendukung upaya perusahaan terhadap pelaksanaan IR, serta, KAP dengan kapabilitas yang mumpuni diharapkan akan membuat kualitas IR menjadi semakin baik. Penelitian Ghani *et. al.* (2018) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran KAP dengan IR. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa audit independen dengan *audit firm's size* yang besar akan cenderung memiliki kualitas IR yang baik.

H1: Ukuran KAP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Tekanan Pemangku Kepentingan Terhadap *Integrated Reporting*

Pemangku Kepentingan yang merupakan komponen penting bagi perusahaan, pastinya memiliki pengaruh – baik signifikan ataupun tidak – terhadap operasi perusahaan. Terdapat kemungkinan bagi mereka untuk menuntut dan mendesak perusahaan untuk mewujudkan kepentingan mereka terhadap perusahaan. Jika pemangku kepentingan memiliki tuntutan tertentu, bukan tidak mungkin bahwa hal itu harus dilaporkan dalam laporan perusahaan. Oleh karenanya, tekanan pemangku kepentingan mungkin akan jadi penentu seberapa IR akan terlaksa

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IR. Penelitian yang menggunakan proksi tekanan dari pemerintah ini menjelaskan bahwa ketika tekanan pemangku kepentingan meningkat, perusahaan akan cenderung untuk tidak mengungkapkan informasi finansial dan non-finansial pada IR, atau bisa disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang lebih sedikit dalam melakukan IR.

H2: Tekanan pemangku kepentingan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Rapat Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*

Komite Audit merupakan unsur yang begitu penting dalam berjalannya operasi perusahaan. Komite audit yang dalam masa pelaksanaan tugasnya mengadakan beberapa kali pertemuan untuk menjalankan tanggung jawabnya, dapat dipertimbangkan sebagai faktor penentu perusahaan dalam upaya pengungkapan informasi finansial dan non-finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016) menunjukkan rapat komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IR. Hal tersebut menjelaskan bahwa frekuensi rapat komite audit yang tinggi akan memengaruhi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak, terutama dalam kaitannya terhadap IR. Penelitian ini didukung Chariri dan Januarti (2017) yang menunjukkan hasil penelitian yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya, komite audit memerlukan serangkaian rapat untuk memantau pelaksanaan tugas dari komite audit. Secara logis, rapat yang intens akan membawakan pembahasan yang semakin luas. Rapat komite audit menjadi salah satu faktor penentu terhadap IR. Karena salah satu tugas pokok komite audit adalah mengawal jalannya audit tahunan, yang juga dimaksudkan

untuk memaksimalkan kualitas laporan tahunan, maka pada poin ini komite audit memiliki peran yang cukup besar dalam pengimplementasian IR. Apakah rapat dengan intensitas tertentu, atau bahkan intensitas tinggi, akan membawakan bahasan tentang IR menjadi lebih dalam atau tidak, sehingga kualitas IR dapat dimaksimalkan.

H3: Rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Otoritas Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*

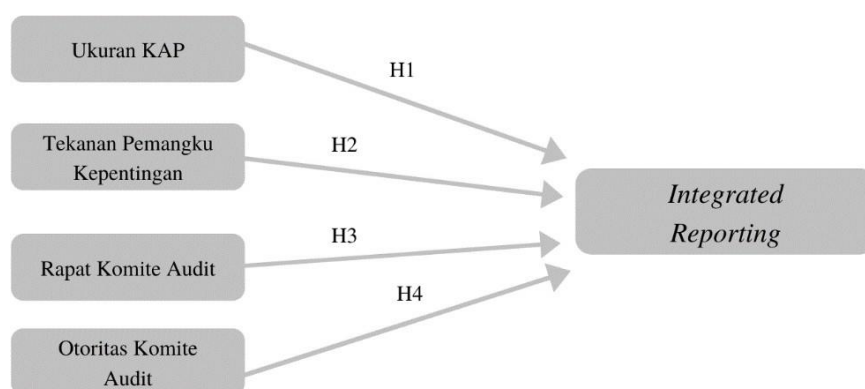
Komite Audit memiliki tugas fundamental berupa pengawasan pelaksanaan pelaporan keuangan, pengawasan terhadap *internal control*, dan juga dilibatkan dalam penentuan auditor independen dalam rangka pelaksanaan audit tahunan. Dalam perjalanannya, nyatanya komite audit telah mengalami perkembangan yang cukup luas. Kini, lingkup otoritas komite audit mampu mencakup upaya-upaya yang membutuhkan tingkat observasi yang lebih kompleks.

Penelitian Haji dan Anifowose (2016) menunjukkan bahwa otoritas komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IR. Hal itu menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan informasi tentang otoritas komite audit memiliki tingkat penerapan IR yang baik. Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa komite audit yang memiliki tugas dan wewenang tertentu akan menunjang diungkapkannya informasi finansial dan non-finansial.

Perluasan otorisasi komite audit mampu menciptakan hasil yang berbeda dari hanya terlaksananya audit tahunan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan tahunan. Informasi non-finansial yang tidak terlalu disorot dalam audit tahunan dapat tersentuh dalam konteks perluasan otorisasi komite audit. Tersentuhnya informasi non-finansial berpotensi meningkatkan pengawasan yang lebih luas, sehingga IR dapat dimaksimalkan dengan baik. Singkatnya, apabila komite audit memiliki otorisasi untuk mendukung pelaksanaan IR, maka peningkatan kualitas IR diharapkan akan terjadi.

H4: Otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Rerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rerangka Konseptual

METODE

Objek dan ruang lingkup yang diteliti dalam penelitian ini adalah *integrated reporting* dari perusahaan di sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2017. Perusahaan di sektor ini dipilih karena penulis menilai informasi yang dimiliki oleh perusahaan yang beroperasi pada sektor ini cukup kompleks.

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda yang digunakan dalam memprediksi variasi dari variabel terikat dengan meregresikan lebih dari satu variabel bebas.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, di mana sampel diseleksi berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Perusahaan properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2017 dan mempublikasikan laporan tahunan selama tahun observasi;
2. Perusahaan yang tidak memiliki bias informasi mengenai variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat, yaitu *integrated reporting* serta variabel-variabel bebas yang meliputi ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit. Berikut pengukuran masing-masing variabel:

Integrated Reporting adalah komunikasi singkat tentang bagaimana strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternalnya, mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang (IIRC, 2013). Penelitian ini menggunakan Indeks IR sebagai instrumen penelitian (proksi) untuk menentukan tingkat penerapan *integrated reporting* sebagaimana telah digunakan dalam penelitian sebelumnya (e.g. Chariri dan Januarti, 2017, Haji dan Anifowose, 2017, Ghani, et. al., 2018, Kurniawan dan Wahyuni, 2018). Indeks IR ini mengadopsi konteks *checklist* yang selaras dengan konten elemen yang dijabarkan dalam IR *framework*. Sesuai IR *framework*, terdapat sembilan konten elemen: (1) ikhtisar organisasi dan lingkungan eksternal, (2) tata kelola, (3) model bisnis, (4) risiko dan peluang, (5) strategi dan alokasi sumber daya, (6) kinerja, (7) Selayang pandang, (8) dasar persiapan dan penyajian, (9) pedoman pelaporan umum. Total *item* yang harus diungkapkan adalah sebanyak 42 *item*. Masing-masing *item* akan dinilai “1” apabila *item* tersebut diungkapkan oleh perusahaan, sementara “0” apabila perusahaan tidak mengungkapkan *item* tersebut.

$$\text{Nilai IR} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan pada laporan Total}}{\text{item sesuai IR Framework}}$$

Kantor Akuntan Publik (*Audit Firms/KAP*) adalah organisasi yang melakukan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik dan meliputi partner, dan staf profesional. Ukuran KAP dapat didefinisikan sebagai ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP (Firiyana dan Septiani, 2014). Ukuran KAP terbagi menjadi dua: KAP berukuran besar (*the big 4 audit firms*) dan KAP berukuran kecil (*non-the big 4 audit firms*). Untuk mengukurnya, digunakan variabel *dummy*, di mana nilai “1” diberikan kepada *big 4*, sementara nilai “0” diberikan kepada *non-big 4*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ghani et. al., (2018).

Menurut Kurniawan dan Wahyuni (2018) tekanan pemangku kepentingan adalah “tekanan” dari stakeholder perusahaan terhadap manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi finansial dan non-finansial (informasi komprehensif). Proksi untuk variabel *stakeholder’s pressure* pada penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Kurniawan dan Wahyuni (2018). Pengukuran dilakukan dengan *dummy* terhadap *stakeholder’s pressure* yang diwakili oleh *government’s pressure*. Nilai “1” diberikan apabila terdapat kepemilikan pemerintah pada saham perusahaan yang bereder dan nilai “0” diberikan apabila tidak terdapat kepemilikan dari pemerintah.

Rapat audit dapat didefinisikan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam rangka menjalankan tugas mereka sebagai mandatoris pemegang saham. Untuk menghitung variabel ini, peneliti melihat total rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu periode pelaporan, yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Model perhitungan seperti ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chariri dan Januarti (2017), serta Haji dan Anifowose (2016).

Bedard *et. al.*, (2004) menyatakan Otoritas Komite Audit merupakan mandat komite audit yang diartikulasikan secara jelas dalam tugas organisasi tertentu. Walaupun pada dasarnya komite audit memiliki otorisasi berupa pengawasan terhadap pembuatan laporan tahunan, *internal control*, atau serangkaian prosedur pengawasan lainnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa komite audit memiliki tugas khusus selain dari pada hal tersebut. Kecenderungan yang demikian, membuat perusahaan perlu untuk mengungkapkan sejauh apa tingkat otorisasi komite audit. Variabel *dummy* digunakan untuk menghitung *audit committee authority*. Nilai “1” digunakan apabila terdapat pernyataan secara jelas dalam laporan tahunan bahwa komite audit memastikan adanya integritas pengungkapan IR, sementara “0” digunakan sebaliknya. Model seperti ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016).

Persamaan linear regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$IR = \alpha + \beta_1 ASIZE + \beta_2 PRESS + \beta_3 ACMEET + \beta_4 ACAUTH + \varepsilon$$

Keterangan:

IR merupakan *Integrated Reporting*

ASIZE merupakan Ukuran KAP

PRESS merupakan Tekanan Pemangku Kepentingan

ACMEET merupakan Rapat Komite Audit

ACAUTH merupakan Otoritas Komite Audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 69 perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di BEI hingga tanggal 31 Desember 2017, hanya 59 perusahaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan. Selanjutnya, terdapat satu perusahaan yang memiliki bias informasi terhadap satu variabel penelitian dalam laporan tahunannya. Sehingga hanya 58 perusahaan tersebut yang memenuhi kriteria data penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif guna mengetahui informasi terkait gambaran dan persebaran data yang diteliti. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari nilai rata-rata, maximum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	ASIZE	PRESS	ACMEET	ACAUTH	IR
Rata-rata	0.224138	21.44313	5.801724	0.698276	0.618637
Maximum	1	24.41372	29	1	0.857143
Minimum	0	17.31202	0	0	0.309524
Std. Dev.	0.418823	1.507170	4.664798	0.460998	0.144708
Observasi	116	116	116	116	116

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui pengujian asumsi klasik, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan uji regresi linier berganda. Hasil uji regresi linier berganda ini diperuntukkan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	T-Statistik	Prob.
C	0.164991	0.158983	1.037785	0.3016
ASIZE	-0.048805	0.027367	-1.783347	0.0773
PRESS	0.014198	0.007454	1.904817	0.0594
ACMEET	0.015568	0.002433	6.399930	0.0000
ACAUTH	0.099983	0.024713	4.045814	0.0001
R-squared	0.428428	Mean dependent var		0.618637
Adjusted R-squared	0.407830	S.D. dependent var		0.144708
S.E. of regression	0.111356	Akaike info criterion		-1.510014
Sum squared resid	1.376428	Schwarz criterion		-1.391325
Log likelihood	92.58083	Hannan-Quinn criter.		-1.461833
F-statistic	20.80029	Durbin-Watson stat		1.662637
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

Berdasarkan tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$IR = 0.164991 - 0.048805ASIZE + 0.014194PRESS + 0.015568ACMEET + 0.099983ACAUTH$$

Uji Statistik F

Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, probabilitas 0.00000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian dan dapat digunakan untuk menaksir nilai aktual secara statistik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil Tabel 2, dapat dilihat bahwa *adjusted R-squared* diperoleh sebesar 0.407830. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0.407830 atau 40.78%. Sementara angka sisanya, menunjukkan variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen.

Uji Statistik t

Dari hasil pengujian statistik t pada tabel 2, dapat diketahui hasil hipotesis yang terbentuk secara parsial antara variabel Ukuran KAP, Tekanan Pemangku Kepentingan, Rapat Komite Audit, dan Otoritas Komite Audit terhadap IR sebagai berikut:

H1: **tidak diterima** lantaran nilai probabilitas $0.0773 > 0.05$

H2: **tidak diterima** lantaran nilai probabilitas $0.0594 > 0.05$

H3: **diterima** lantaran nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$.

H4: **diterima** lantaran nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap *Integrated Reporting*

Hasil pengujian hipotesis tidak mampu membuktikan bahwa ukuran KAP dapat memberikan pengaruh terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa KAP dengan ukuran yang besar tidak mampu menjamin kualitas pelaksanaan IR. Di lain hal, KAP dengan ukuran tidak besar, bukan berarti tidak dapat mengakomodir kebutuhan *client* yang lebih kompleks dari perusahaan kebanyakan.

Hasil ini tidak berpengaruh dapat disebabkan karena KAP dengan ukuran yang besar telah memiliki *standart operation procedure* tersendiri yang belum mampu mengakomodir adanya keinginan *client* yang menuntut pelaksanaan IR. Hal ini juga bisa menjadi indikasi bahwa KAP dengan ukuran yang besar menilai praktik IR belum saatnya diterapkan pada perusahaan terkait.

Tuntutan adanya pengungkapan informasi yang terintegrasi dan lebih kompleks mungkin menjadi pertimbangan tertentu mengapa KAP dengan ukuran besar tidak mampu memperlancar praktik IR. Hal ini diperkuat dengan pelaksanaan praktik IR di Indonesia yang masih belum mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk KAP sebagai pemberi jasa asersi kepada perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soliman (2013) dan Agyei-Mensah (2012) yang menguji pengaruh antara variabel ukuran KAP terhadap *voluntary disclosure*. Kedua penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan hipotesis yang dikembangkannya mengenai pengaruh ukuran KAP terhadap *voluntary disclosure*, sehingga tidak ditemukan bukti bahwa ukuran KAP mampu memengaruhi variabel dependen.

Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan terhadap *Integrated Reporting*

Hasil pengujian hipotesis tidak dapat membuktikan adanya pengaruh antara tekanan pemangku kepentingan dan IR. Hal ini membuktikan bahwa tekanan yang diperoleh dari pemangku kepentingan tidak mampu memengaruhi manajemen dalam meningkatkan kualitas IR.

Hasil penelitian ini tidak berpengaruh disebabkan karena tekanan yang datang dari pemangku kepentingan tidak mampu diakomodir oleh manajemen perusahaan. Pada sisi yang berbeda, pemangku kepentingan juga belum memiliki pemahaman yang memadai tentang IR, sehingga pemangku kepentingan belum bisa memberikan tuntutan strategis yang benar-benar mampu dipahami oleh manajemen perusahaan dan mampu menggerakkan praktik IR pada perusahaan.

Tidak terbuktinya pengaruh antara tekanan pemangku kepentingan ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menyebutkan bahwa kebijakan perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang memiliki kapasitas tertentu terhadap perusahaan tidak terbukti mampu meningkatkan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial yang diharapkan apabila IR diterapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam konteks praktik IR, perusahaan memandang pemangku kepentingan sebagai pihak yang tidak memiliki peran strategis yang mampu memengaruhinya dalam pelaksanaan praktik tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018) yang menguji pengaruh terhadap laporan berkelanjutan. Dari hasil penelitian tersebut, tidak ditemukan pengaruh dari pemangku kepentingan yang merupakan pemegang saham terhadap laporan berkelanjutan. Hasil tersebut memberikan jawaban bahwa kualitas laporan berkelanjutan tidak dapat ditingkatkan apabila terdapat tekanan dari pemangku kepentingan yang merupakan pemegang saham.

Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Integrated Reporting*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara rapat komite audit terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang tinggi dapat meningkatkan kualitas IR. Dengan frekuensi rapat yang tinggi, pembahasan bisa semakin luas dan komprehensif, sehingga poin-poin mengenai IR akan bisa tersentuh dan pengungkapan informasi finansial dan non-finansial akan didukung dengan baik.

Komite audit yang memiliki frekuensi rapat yang intens, mampu mengakomodir pengungkapan informasi yang lebih luas. Pengungkapan informasi tersebut mampu menjamah keinginan manajemen ataupun *principal* yang menghendaki terlaksananya IR dalam pelaporan perusahaan mereka. Selain itu, dengan frekuensi yang tinggi, komite audit juga mampu menjamin kualitas pengungkapan IR karena evaluasi mendalam yang dilakukan selama rapat tersebut dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016), serta Chariri dan Januarti (2017). Kedua penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara rapat komite audit dan IR. Frekuensi rapat yang tinggi nyatanya mampu membawa pengungkapan informasi menjadi lebih baik sehingga praktik IR dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Pengaruh Otoritas Komite Audit terhadap *Integrated Reporting*

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara otoritas komite audit dan IR. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa otoritas komite audit yang meluas, tidak hanya berfokus terhadap pengawasan audit tahunan dan informasi keuangan, mampu memberikan *added value* terhadap pelaporan perusahaan.

Perluasan otoritas yang mampu menjamah informasi non-keuangan dapat membawakan praktik IR di perusahaan menjadi lebih baik. Sehingga informasi yang diungkapkan sejalan dengan IR *framework* dan mampu memberikan informasi yang lebih terintegrasi. Tersajinya informasi yang terintegrasi, sesuai teori pemangku kepentingan, merupakan hasil yang dipengaruhi oleh tuntutan pemangku kepentingan yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pelaporan, terkhusus terlaksananya IR secara maksimal. Perluasan tersebut mampu memberikan manuver yang lebih komprehensif bagi komite audit untuk menjalankan fungsinya dalam rangka pengawasan pelaporan perusahaan, sehingga IR menjadi poin kritis yang berada dalam otoritas komite audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji dan Anifowose (2016). Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara otoritas komite audit dan IR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan sebelumnya, yaitu membuktikan apakah variabel ukuran KAP, tekanan pemangku kepentingan, rapat komite audit, dan otoritas komite audit memiliki pengaruh terhadap *integrated reporting*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan sektor property, real estat, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017 dengan total observasi yang diteliti sebesar 99.

Jika melihat hasil pengujian hipotesis, acuan perusahaan, dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran KAP tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran KAP yang besar tidak mampu mendukung pengimplementasian praktik IR pada perusahaan.
2. Tekanan pemangku kepentingan tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap IR. Hal tersebut menunjukkan bahwa tekanan berlebih yang datang dari pemangku kepentingan tidak dapat meningkatkan kualitas praktik IR pada perusahaan.
3. Rapat komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan komite audit dengan frekuensi rapat yang makin tinggi mampu memberikan peningkatan terhadap implementasi IR pada perusahaan. Otoritas komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IR. Hal ini menjelaskan otoritas komite audit yang diperluas, mampu memberikan dampak peningkatan terhadap praktik IR perusahaan.

Saran

1. Perlu lebih dalam mengkaji dan mencari landasan yang kuat tentang *integrated reporting* secara lebih komprehensif.
2. Perlu memperluas sektor industri yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian agar hasil yang didapatkan dapat memberikan penjelasan yang lebih luas.
3. Perlu mempertimbangkan pengujian variabel independen lain guna mencari tahu faktor pengaruh IR secara lebih luas.
4. Perlu mempertimbangkan operasionalisasi variabel lain pada variabel ukuran KAP seperti jumlah partner, total pendapatan, dan jumlah auditor.
5. Perlu mempertimbangkan operasionalisasi variabel lain pada variabel tekanan pemangku kepentingan seperti jumlah publikasi media terkait konflik perusahaan dengan masyarakat,

putusan pengadilan, tekanan efisiensi keuangan perusahaan, dan restrukturisasi atau pergantian direksi.

6. Perlu mempertimbangkan cara mengukur IR yang tidak hanya menggunakan *checklist item* agar pengukuran tidak terbatas pada *item* yang diungkapkan, tetapi kualitas dari IR itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J. Park, Y. Parker, S. "The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud" *Managerial Finance*. 2000, hal. 55–67.
- Abdurahman, Maman dan Sambas Ali Muhidin. 2017. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Abeysekera, Indra. "A template for integrated reporting", *Journal of Intellectual Capital*. Oktober 2012, 29, hal. 227-245.
- Adams, Carol A. "The International Integrated Reporting Council: a call to action", Elsevier: Critical Perspectives on Accounting. Juli 2014, 2, hal. 23-28.
- Agyei-Menash, Ben K. "Association between firm-specific characteristics and levels of disclosure of financial information of rural banks in the Ashanti region of Ghana", **Journal of Applied Finance & Banking**. 2012, hal. 69-92.
- BDO. Effective Audit Committee Guide: When Should the Audit Committee Meet with Management, Internal Audit and the Independent Auditors?. <https://www.bdo.com/index-php/effective-audit-committees-for-nonprofit-organizations/the-whens/the-whens-when-should-the-audit-committee-meet-with-management-internal-audit-and-the-independent-auditors> (Diakses tanggal 5 Mei 2019).
- Bedard, J. Chtourou, S. M. Croteau, L. "The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management", *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. September 2004, hal. 13–35.
- Broadbent, Jane. "Debate: Climate change and sustainability— 'PMM Live!'", *Public Money & Management*. Maret 2016, 30, hal. 238-240.
- Chariri, Anis. Januarti Indira. "Audit Committee Characteristics and Integrated Reporting: Empirical Study of Companies Listed on the Johannesburg Stock Exchange", *European Research Studies Journal*. Desember 2017, hal. 305-318.
- Cortesi, Alessandro. Vena, Luigi. "Disclosure Quality Under Integrated Reporting: a Value Relevance Approach", *Journal of Cleaner Production*. Februari 2019, 14, hal. 1-26.
- Darajati, Wahyuningsih. Peran Dunia Usaha dan Industri Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Bandung: Universitas Padjajaran, 2018. (Bahan Presentasi).
- Fadly. Integrated Reporting: Sebuah Pendekatan Baru dalam Pelaporan Nilai Perusahaan. 2015. <https://jagoakuntansi.com/2015/12/03/integrated-reporting-sebuah-pendekatan-baru-dalam-pelaporan-nilai-perusahaan/> (Diakses tanggal 25 Maret 2019).

- Fernandez-Feijoo, Belen. Romero, Silvia. "Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework", *Journal of Business Ethics*. Mei 2013, 10, hal. 53-63.
- Firyana, Rachma Aulia. Septiani Aditya. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggantian Kantor Akuntan Publik Secara Voluntary", **Diponegoro Journal of Accounting**. 2014, hal.1-15.
- Freeman, R. E. "Strategic Management: A Stakeholder Approach", Boston: Pitman. 1984, hal. 228-241.
- Freeman, R. E. *et. al.* *Stakholder Theory The State of The Art*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Gamerschlag, R. Moller, K. Verbeeten, F. "Determinants of Voluntary CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany", *Review of Managerial Science*. Oktober 2010, 5, hal. 233-262.
- Ghani, E. K. *et. al.* "Factors influencing integrated reporting practices among Malaysian public listed real property companies: a sustainable development effort", *International Journal of Managerial and Financial Accounting*. Mei 2018, 11, hal. 145-162.
- Ghozali, Imam dan Dwi, Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika. Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenwood, M. "Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate Responsibility", *Journal of Business Ethics*. Juli 2007, 24, hal. 315-327.
- Haji, Abdifatah Ahmed. Anifowose, Mutalib. "Audit Committee and Integrated Reporting Practice: Does Internal Assurance Matter?", *Emerald Insight: Managerial Auditing Journal*. September 2016, hal. 1-44.
- Haji, Abdifatah Ahmed. "The role of audit committee attributes in intellectual capital disclosures: evidence from Malaysia", *Managerial Auditing Journal*. Agustus 2015, 9, hal. 756-784.
- Hamudiana, Arum. Achmad, Tarmizi. "Pengaruh Tekanan Stakeholder Terhadap Transparansi Laporan Keberlanjutan Perusahaan- Perusahaan Di Indonesia", *Diponegoro Journal of Accounting*. November, 2017, hal. 1-11.
- Helmig, Bernd. Spraul, Katharina. Ingenhoff, Diana. "Under Positive Pressure: How Stakeholder Pressure Affects Corporate Social Responsibility Implementation", **Business & Society**. 2016, hal. 151-187.
- Hermuningsih, Sri. "Dampak Invesment Opportunity Set Terhadap Cost of Equity Capital dengan Diclosure Sebagai Variabel Mediasi". Kertas Kerja pada Doctoral Colloquium & Conference FEB UGM, Yogyakarta, 28-29 November 2012.
- Huang, C. Kung, F. "Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence from Taiwan", *Journal of Business Ethics*. April 2010, 7, hal. 435-451.
- International Integrated Reporting Council. *The International <IR> Framework*. 2013.

International Integrated Reporting Council. Why? The need for change. <http://integratedreporting.org/why-the-need-for-change/> (Diakses tanggal 22 april 2019).

Jensen, Julia Catharina. Berg, Nichola. "Determinants of Traditional Sustainability Reporting Versus Integrated Reporting. An Institutional Approach", Business Strategy and The Environment. November 2011, hal. 299-316.

KPMG Advisory N.V., *et. al.* Carrots And Sticks – Promoting Transparency And Sustainability. South Africa: UNEP, KPMG Advisory N.V., 2010.

Kuncoro, Mudrajad. 2011. Metode Kuantitatif. Edisi 4. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Kurniawan, Putu Sukma. Wahyuni, Made Arie. "Factors Affecting Company's Capability In Performing Integrated Reporting: An Empirical Evidence From Indonesian", Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan. Oktober 2018, 31, hal. 141-155.

Lee, Kin-Wai. Yeo, Gillian Hian-Heng. "The association between integrated reporting and firm valuation", Springer. September 2015, 14.

Li, Jing. Mangena, Musa. Pike, Richard. "The effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure", Elsevier: The British Accounting Review. 2012, hal. 98-110.

Lu, Yingjun. Abeysekera, Indra. "Stakeholders' power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: evidence from China", Elsevier: Journal of Cleaner Production. Oktober, 2013, 2, hal. 426-436.

Macnab, Alasdair. "Debate: Would outcome costing and integrated reporting link resources to strategy in the public sector?", Public Money & Management, Agustus 2015, 26, hal.399-400.

Marsha, Felicia. Ghozali, Imam. "Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba", Diponegoro Journal of Economics. April 2017, hal. 1-12.

Montecalvo, Monica. Farneti, Federica. Villiers, Charl de. "The potential of integrated reporting to enhance sustainability reporting in the public sector", Public Money & Management. Juni 2018, 1, hal. 365-374.

Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2008. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Olsen, Tricia D. "Political Stakeholder Theory: The State, Legitimacy, and the Ethics of Microfinance in Emerging Economies", Business Ethics Quarterly. Januari 2017, hal. 71-98.

Pavlopoulos, Athanasios. Magnis, Chris. Iatridis, George Emmanuel. "Integrated reporting: An accounting disclosure tool for high quality financial reporting", Research in International Business and Finance. Februari 2019, 11, hal. 1-64.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

PricewaterhouseCoopers. Integrated Reporting Going beyond the financial results. 2013.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. Daftar Kantor Akuntan Publik. <http://pppk.kemenkeu.go.id/Publikasi/Details/29> (Diakses tanggal 2 Mei 2019).

Rudyanto, Astrid. Siregar, Sylvia Veronica. "The effect of stakeholder pressure and corporate governance on the sustainability report quality", **International Journal of Ethics and Systems**. 2018, hal. 233-249.

Saemargani, Fitria Ingga. Mustikawati, Indah. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Kap, Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay", Jurnal Nominal. September, 2015, hal. 1-15.

SAICA. An integrated report is a new requirement for listed companies. 2011. <https://www.saica.co.za/tabid/695/itemid/2344/an-integrated-report-is-a-new-requirement-for-list.aspx> (Diakses tanggal 25 Maret 2019).

Shanti. Tjahjadi, Bambang. Marsa, I Made. "The Effect of Integrating Reporting on Earnings Quality: A Study of Family Firms in Indonesia", Journal of Finance and Banking Review. September 2018, 30, hal. 34-40.

Soliman, Mohamed Moustafa. "Firm Characteristic and the Extent of Voluntary Disclosure: The Case of Egypt", **Research Journal of Finance and Accounting**. 2013, hal. 71-80.

Tagesson, Torbjörn. et. al. "What Explains the Extent and Content of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations", Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Maret 2009, 30, hal. 352-364.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

United Nations. Why the SDGs Matter. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/why-the-sdgs-matter/> (Diakses tanggal 22 Maret 2019).

Zhou, Shan. Simnett, Roger. Green, Wendy. "Does Integrated Reporting Matter to the Capital Market?", Journal of Accounting, Finance, and Business Studies. Maret 2017, 2, hal. 94-132.